

Peran *Monitoring* Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan di Industri Perbankan Indonesia

Rudi Zulfikar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email Address:

rz-zulfikar72@untirta.ac.id

Abstract: The purpose of this study was to examine the role of company monitoring on the financial performance of Regional Development Banks (BPD) in Indonesia. The monitoring role is proxied by the characteristics of the Board of Commissioners, the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. Financial performance is measured by Return on Assets (ROA). By purposive sampling, secondary data was selected from 66 annual reports of Regional Development Banks (BPD) for 2017-2019 in Indonesia. The average level of financial performance is at 4.11%. This figure shows that the company's assets to generate profits for shareholders amounted to 4.11%. The regression results show that there is a positive influence on the proportion of independent commissioners on financial performance at Regional Development Banks and there is a positive influence on the size of the risk monitoring committee on financial performance at Regional Development Banks. Other Results The size of the board of commissioners, the size of the audit committee and the number of audit committee meetings have a negative effect. While the control variable, namely company size, has a positive effect in predicting financial performance.

Keywords: Monitoring, Financial Performance, Regional Development Bank.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Peran pengawasan diproksikan dengan karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Kinerja keuangan diukur dengan Return on Assets (ROA). Secara purposive sampling, data sekunder dipilih dari 66 laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) periode 2017-2019 di Indonesia. Tingkat rata-rata kinerja keuangan berada pada 4,11%. Angka tersebut menunjukkan bahwa aset perusahaan yang menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham adalah sebesar 4,11%. Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah dan terdapat pengaruh positif ukuran komite pemantau risiko terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah. Hasil Lain Jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif. Sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dalam memprediksi kinerja keuangan.

Kata Kunci: *Monitoring*, Kinerja Keuangan, Bank Pembangunan Daerah.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran monitoring yang diprosikan Oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan di Bank Pembangunan Daerah. Industri perbankan dalam akitfitasnya patuh pada pengawasan dan pemantauan pengawasan. Baik kepemilikan bank tertutup atau milik publik. Lingkungan peraturan dapat mempengaruhi efektivitas mekanisme kontrol perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan yaitu Regulasi merupakan jenis mekanisme pengawasan. Tujuan pengawas (regulator) memastikan bahwa bank mematuhi secara konservatisme tertentu dalam praktik bisnis sehingga industri perbankan tetap aman dan sehat. Regulator menilai bank menurut risikonya dan kriteria keuangan serta mengharuskan bank memiliki modal relatif terhadap jumlah risiko. Regulator memberlakukan persyaratan modal yang sama pada kedua jenis bank publik dan bank swasta. Sedangkan regulasi pada dasarnya sama terlepas dari organisasi bank.

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. memegang sebagai *financial intermediary* atau perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang bank, bahwa usaha bank terdiri dari tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang undang tersebut, salah satu bentuk kepemilikan bank yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah merupakan bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekeayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Beberapa kasus yang berkaitan dengan BPD antara lain Bank BJB Cabang Sukajadi Bandung pada 2008-2010, kredit fiktif Bank BJB Cabang Surabaya pada 2013, kredit fiktif Bank BJB Cabang Sukabumi pada 2012, dan kredit fiktif Bank BJB Syariah pada 2014-2016.

Kasus lainnya di Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Dompu Tahun 2018 yaitu pencucian uang sebesar Rp6,2 Miliar. Akibat dari beberapa kasus tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja keuangan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap BPD. Kasus penurunan kinerja keuangan bank menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi memberikan dampak negatif terhadap penurunan kinerja keuangan bank (Ozkan, Kaytmaz Balsari dan Varan, 2014).

Fakta di atas menunjukkan bukti bahwa berbagai kasus yang terjadi di industri perbankan Indonesia merupakan akibat dari lemahnya pengawasan internal dan aspek kepatuhan terhadap regulasi, sehingga berimplikasi terhadap penurunan kinerja keuangan (<https://keuangan.kontan.co.id>,2018). Hal ini dikarenakan kekurangmampuan pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas bank (Dewatropint dan Tirole, 1993). Ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan (PJK) untuk memenuhi ketentuan peraturan menyebabkan penyedia jasa keuangan tersebut berhadapan dengan risiko hukum (koran.tempo.co, 2013). Menurut survey Bank Indonesia (2010) beberapa kasus perbankan disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, lemahnya penerapan CG, ketidakpercayaan publik, adanya perubahan lingkungan bisnis dan kebijakan pemerintah. Salah satu penyebab terjadinya beberapa kasus tersebut diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/ 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi bank umum mewajibkan semua bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Informasi kinerja keuangan dibutuhkan bagi masyarakat dalam kaitannya menghindari *high-risking* bank (Hunjak dan Jacovevic, 2001). Sementara itu bagi regulator, informasi kinerja keuangan bank bermanfaat untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan (Taswan, 2006). Bagi investor, informasi kinerja keuangan berguna untuk menilai kinerja dan tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola bank (Booth, Cornett, dan Tehranian, 2002).

Dengan demikian semakin tinggi tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi maka semakin kecil risiko yang dihadapi. Dengan minimnya risiko yang dihadapi menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan dan mengelola asetnya secara efisien. Semakin tinggi tingkat efisiensi bank maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang diperoleh suatu bank (Naceur dan Omeran, 2011).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Mbilla, Nyead, Gbegble, & Ayimpoya, (2020) membuktikan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan industri perbankan. Hasil ini sama dengan penelitian Ajili & Bouri (2018). Sementara itu, penelitian Birindelli, Dell'Atti, Iannuzzi & Savioli (2018) membuktikan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Akan tetapi hasil berbeda dibuktikan oleh Dobija, & Kravchenko (2017) menyimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Selanjutnya, Chijoke-Mgbame, Boateng, & Mgbame (2020).

KAJIAN TEORI

Kinerja Keuangan. Kinerja Keuangan merupakan mengukur posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan (Malik dan Nadeem, 2014). Dengan demikian kinerja keuangan menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya untuk menadapatkan pendapatan. Penilaian kinerja keuangan penting dilakukan oleh manajemen perusahaan, pemegang saham (*shareholder*), kreditur, regulator, maupun oleh *stakeholder*, karena menyangkut distribusi kesejahteraan di antara mereka (Adams dan Mehran, 2011).

Penggunaan ROA untuk bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva.

Dengan demikian ROA untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan mengelola total aset setelah disesuaikan dengan biaya untuk mendapatkan aset tersebut. Selain itu juga bisa untuk menilai efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan semua aset yang dimilikinya.

Dewan Komisaris. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang senantiasa harus dilaksanakan secara independen menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yaitu:

1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *corporate*

governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank; 3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank; dan Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/DPNP/2013, menyatakan bahwa jumlah minimal Komisaris Independen adalah sebanyak 50% dari jumlah total anggota Dewan Komisaris. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris didukung keberadaan Komisaris Independen (John dan Senbet, 1998). Dengan demikian Dewan Komisaris merupakan organ penting dalam implementasi corporate governance. Fungsi monitorong yang dilakukan terhadap operasional perbankan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen bank sehingga kepercayaan bank meningkat dan pada akhirnya kinerja keuangan meningkat.

Komite Audit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, tugas Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris.
- 3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu perusahaan daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota se- Indonesia, yang menyediakan layanan jasa perbankan sebagaimana bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional lainnya. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1962, Bank Pembangunan daerah (BPD) adalah bank yang didirikan di Daerah Swatantra Tingkat I yang dimaksudkan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Fungsi Bank Pembangunan Daerah diatur melalui UU No. 13 Tahun 1962

tentang ketentuan pokok BPD. Dalam UU ini disebutkan bahwa BPD memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan proyek di daerah, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh perusahaan campuran antara pemerintah daerah dan swasta.

Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu kelompok bank yang turut berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dikatakan demikian karena Bank pembangunan Daerah sebagai pemegang kas daerah dalam kegiatannya berfungsi melakukan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha atau proyek di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan maka sejumlah Bank Pembangunan Daerah merubah bentuk hukumnya dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT).

Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan. Menurut (Klein, 1998) Ukuran Dewan Komisaris sering digunakan sebagai indikator untuk *monitoring* dan peran penasihat manajemen perusahaan. Menurut Penelitian (Ujunwa, 2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Penelitian (Darmadi, 2013) membuktikan terdapat pengaruh positif Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja keuangan. Dari ketergantungan sumber daya Perspektif Dewan Komisaris besar menimbulkan lebih banyak biaya sementara, ukuran Dewan Komisaris kecil mungkin tidak efektif *monitoring* manajemen. Ukuran Dewan Komisaris juga tergantung pada usia dan ukuran perusahaan (Fernandez et al., 2013). Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa:

H1: Terdapat pengaruh positif Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan.

Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen untuk melindungi pemilik perusahaan. Tanpa independensi, Komisaris Independen tidak akan bisa untuk menjalankan peran mereka secara efektif dan untuk memberikan penilaian yang tidak bias. Penelitian sebelumnya tentang independensi Komisaris Independen dan kinerja keuangan menunjukkan hasil yang beragam, baik hubungan negatif, nol atau positif. Menurut (Guo et al., 2014) berpendapat pendapat itu independensi tidak menjamin untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan karena lemah memantau peran komisaris independen. (Hermalin dan Weisbach, 2003) tidak menemukan hubungan antara independensi dewan dan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, (Abdullah, 2004) melaporkan hubungan positif antara independensi dewan dan perusahaan kinerja keuangan. Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa independensi Komisaris mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pandangan ini, kami berhipotesis bahwa:

H2: Terdapat Pengaruh Positif Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan.

Ukuran Komite Audit dan Kinerja Keuangan. (Tornyeva dan Wereko, 2012) berpendapat bahwa ukuran komite audit mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan, dan mereka membuktikan hubungan positif yang signifikan antara ukuran komite audit yang lebih besar dan kinerja keuangan. Hal ini karena komite audit lebih besar dengan variasi pengalaman dan pengetahuan cenderung meningkatkan efektivitas fungsi

pemantauan komite dan karena itu mengarah pada kinerja keuangan yang lebih baik. Pembuktian lainnya bahwa ukuran komite audit yang lebih besar tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan antara lain dilakukan oleh (Romano *et al.*, 2012); (Brick dan Chidambaran, 2010) berpendapat bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan. Selain itu, (Al-Matari *et al.*, 2012) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara audit ukuran komite (ACS) dan kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis penelitiannya:

H3: Terdapat pengaruh positif Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja keuangan.

Jumlah Rapat Komite Audit dan Kinerja Keuangan. Komite Audit mengarah pada peningkatan kinerja keuangan. Komite Audit mengadakan pertemuan rutin dengan auditor eksternal dan internal, yang membantu komite untuk menilai laporan keuangan dan menerapkan kebijakan untuk menilai praktik para eksekutif. Dengan demikian, semakin banyak rapat komite harus menghasilkan yang lebih baik mekanisme pengawasan yang dapat memotivasi eksekutif untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Sebagai Hasilnya, frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan kinerja keuangan. (Azam *et al.*, 2010) melaporkan bahwa frekuensi rapat komite audit menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, (Abbott *et al.*, 2000) menyatakan bahwa file rapat komite audit kemungkinan akan menghasilkan kualitas peran auditor yang lebih tinggi melindungi keuntungan pemegang saham atau kinerja perusahaan. Mereka juga melaporkan hal itu saat audit Komite mengadakan pertemuan setidaknya dua kali setahun, hal itu menghasilkan pengurangan penipuan di perusahaan. (Beasley *et al.*, 2000) mendukung gagasan ini dan mereka menemukan bahwa perusahaan cenderung melakukan kecurangan ketika komite audit mereka jarang mengadakan rapat. Ini dapat menyiratkan bahwa aktivitas dan rapat komite audit dapat memastikan kinerja perusahaan yang baik. Demikian hipotesis penelitiannya adalah:

H4: Terdapat pengaruh positif jumlah rapat Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan.

Ukuran Komite Pemantau Risiko dan Kinerja Keuangan. Ukuran Komite Pemantau Risiko memiliki konsekuensi penting pada optimalisasi monitoring. Menurut (Erkens *et al.*, 2012) dan (Smith, 2003) Komite Pemantau Risiko harus memiliki setidaknya tiga anggota untuk memastikan berfungsi dengan baik. (DeFond dan Francis, 2005) menegaskan bahwa Komite Pemantau Risiko harus didukung dengan otoritas dan sumber daya yang memadai untuk beroperasi sepenuhnya. Teori keagenan memprediksi bahwa peningkatan ukuran Komite Pemantau Risiko dengan kemungkinan pengetahuan yang bervariasi meningkatkan memantau perilaku manajer terhadap manajemen risiko dan memastikannya investasi sejalan dengan tujuan strategis untuk menghindari krisis keuangan melalui penurunan yang merugikan seleksi dan *moral hazard* yang dapat mempengaruhi kinerja (Aebi *et al.*, 2012; Jensen dan Meckling, 1976; Yatim, 2010). (Bédard *et al.*, 2004) berpendapat bahwa semakin besar ukuran Komite Pemantau Risiko, semakin banyak keragaman dan keahlian yang dimilikinya untuk membuatnya lebih efisien rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu:

H5: Terdapat pengaruh positif Ukuran Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh monitoring yang diprosikan oleh karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan di industri Perbankan Indonesia dengan jenis Bank Pembangunan Daerah. Periode Penelitian ini yaitu 2017 – 2019. yang merupakan buntut dari krisis keuangan global dan strategi berikutnya untuk mengurangi risiko dan juga setelahnya Laporan Walker (2009). Pada saat yang sama, menggunakan tahun 2017 sebagai titik awal penelitian memberikan wawasan yang baik tentang efek dari laporan Walker (2009), yang menunjukkan bahwa semua LK industri bank yang terdaftar harus memiliki Komite Pemantau Risiko terpisah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 66 *annual report*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs masing-masing perusahaan sampel dan publikasi Bank Indonesia.

Variabel dan Pengukuran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). ROA adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva bank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan Erhardt, 2005); (SE BI No. 6/73/DPNP/2004):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu:

Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris merupakan dewan yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris (KNKG, 2004). Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Dalton *et al.*, 1999); (Beiner *et al.*, 2003).

Komisaris Independen, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Variabel ini berdasarkan proporsi jumlah Komisaris Independen dari seluruh anggota Dewan Komisaris. (Ujiyanto dan Pramuka, 2007).

Ukuran Komite Audit, merupakan Komite yang memberikan keyakinan atas keyakinan penyajian laporan keuangan. Komite Audit dapat diukur dengan jumlah total anggota Komite Audit yang ada di dalam perusahaan (Prabowo *et al.*, 2011).

Jumlah Rapat Komite Audit, merupakan adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian

Li *et al.* (2008) dan Permatasari (2009) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun.

Ukuran Komite Pemantau Risiko, merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pengukuran Komite Pemantau Risiko dalam penelitian ini dengan menghitung jumlah total anggota Komite Pemantau Risiko yang ada di dalam perusahaan.

Variabel Kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (*Size*) sebagai *Size* diukur dengan menggunakan log natural dari total aset (Love dan Klaper, 2002).

Analisis Data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

Pengujian statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dilihat dari nilai mean, standar deviasi, varians, maksimum, dan minimum dari setiap data sampel (Ghozali, 2001). Pengujian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi dan perilaku data sampel.

Selanjutnya dilakukan pengujian analisis regresi dengan tujuan untuk menguji prediksi model serta pengujian hipotesis penelitian. Adapun Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{ROA} = a + \beta_1 \text{UDK} + \beta_2 \text{PKI} + \beta_3 \text{UKA} + \beta_4 \text{JRKA} + \beta_5 \text{UKPR} + \beta_6 \text{SIZE} + e \quad (1)$$

Keterangan:

ROA : Return on Assets

a : Konstanta

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

PKI : Proporsi Komisaris Independen

UKA : Ukuran Komite Audit

JRKA : Jumlah Rapat Komite Audit

UKPR : Ukuran Komite Pemantau Risiko

SIZE : Size

e : Error

β : Koefisien regresi

HASIL dan PEMBAHASAN

Deskriptif Data. Populasi dalam penelitian ini adalah bank pembangunan daerah di Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2019 yang berjumlah 78 sampel. Berdasarkan teknik *purposive sampling* jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 66 data observasi. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Tahun	Populasi	Sampel Penelitian
2017	26	22
2018	26	22
2019	26	22
Total	78	66

Nilai Rerata ROA adalah sebesar 4,11%; rerata ukuran Dewan Komisaris adalah 4 orang; rerata proporsi Komisaris Independen sebesar 64%; rerata ukuran Komite Audit adalah 4 orang; rerata jumlah rapat Komite Audit sebanyak 11 kali; rerata ukuran Komite Pemantau Risiko adalah 3 orang; dan rerata size sebesar 3,10%.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
ROA	66	1.11	8,1	4,11	19,55
UDK	66	3.00	5.00	3,77	0,77
PKI	66	50.00	100.00	64%	20,22
UKA	66	3.00	5.00	3,77	0,66
JRKA	66	5.00	31.00	10,88	7,1
UKPR	66	1.00	4.00	3	0,69
SIZE	66	3.22	5	3,1	.51

Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *enter*. Hasil regresi berganda setelah pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	11,224	6,15	0,000
Ukuran Dewan Komisaris	-0,011	-0,231	0,812
Proporsi Komisaris Independen	0,033	-2,321	0,005*
Ukuran Komite Audit	0,06	0,077	0,812
Jumlah Rapat Komite Audit	-0,007	-0,325	0,777
Ukuran Komite Pemantau Risiko	0,023	0,14	0,01*
Size	-2,09	-2,54	0,000*
R Square	0,414		
Adjusted R Square	0,293		
F	4,479		
Sig	0,000		
Keterangan:			
(*) signifikan pada tingkat 5%			

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,293. Berdasarkan nilai *Adjusted (R²)* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 29,3% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dan sisanya sebanyak 70,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Dalam tabel tersebut menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,479 dengan probabilitas 0,000 ($p\text{-value} < 0,05$). Karena nilai F lebih besar dari 4,00 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan atau dapat dikatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit, ukuran Komite Pemantau Risiko serta *size* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ukuran Dewan Komisaris mempunyai *p-value* sebesar 0,716 pada tingkat signifikansi 0,05 dan menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,079, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Chtourou *et al.* (2002) dan Darmawati *et al.* (2003) namun mendukung penelitian Beasley (1996) dan Bainer *et al.* (2003). Ukuran Dewan Komisaris yang terlalu besar dianggap terlalu banyak keahlian yang dimiliki sehingga tidak fokus terhadap permasalahan yang ada serta sulitnya koordinasi antara anggota Dewan Komisaris. Hal ini diduga anggota Dewan Komisaris di BPD tidak dipilih secara obyektif melainkan dari mantan pejabat atau dari partai politik sehingga tidak mengutamakan kompetensi dan kapabilitas sebagai Dewan Komisaris.

Proporsi Komisaris Independen mempunyai *p-value* sebesar 0,005 pada tingkat signifikansi 0,05 dan menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,03. Dengan demikian disimpulkan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka hipotesis dua diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusumawati dan Riyanto (2005).

Keberadaan Komisaris Independen di industri perbankan selain pemenuhan regulasi juga untuk mengoptimal fungsi pengawasan. Sylvia dan Sidharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan Komisaris Independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi serta untuk menegakkan *corporate governance* di dalam perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar kepemilikan saham mayoritas di BPD dimiliki oleh pemerintah sehingga menjadikan BPD merupakan penggerak ekonomi daerah yang harus dijaga kepercayaannya oleh masyarakat.

Ukuran Komite Audit mempunyai *p-value* sebesar 0,812 dengan nilai signifikansi 0,05 dan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,020, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Beasley (1996), yang melaporkan bahwa komposisi Dewan Komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dari pada kehadiran komite audit. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Veronica dan Bachtiar (2004), yang menyatakan bahwa tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Penulis menduga bahwa pengangkatan Komite Audit di BPD hanya untuk pemenuhan undang-undang yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *corporate governance*.

Jumlah rapat Komite Audit mempunyai *p-value* sebesar 0,777 pada tingkat signifikansi 0,05 dan menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini didukung penelitian Vafeas (1999) yang menemukan bahwa semakin sering frekuensi rapat *board* berhubungan dengan penurunan harga saham perusahaan. Selain itu, penulis menduga bahwa rapat yang diadakan Komite Audit BPD menimbulkan biaya perjalanan maupun biaya *meeting* yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah laba.

Ukuran Komite Pemantau Risiko mempunyai *p-value* sebesar 0,01 pada tingkat signifikansi 0,05 dan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,023, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Pemantau Risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut mungkin dikarenakan Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan baik sesuai pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006. Keberadaan Komite Pemantau Risiko dapat mengurangi terjadinya risiko di Industri Perbankan. Hal ini karena Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan keyakinan atas risiko yang akan terjadi di Bank.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa Komisaris Independen dan Ukuran Komite Pemantau Risiko di Industri perbankan berperan untuk mengurangi terjadi risiko yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Pembuktian lainnya bahwa bank dengan Aset besar memiliki fungsi pengawasan optimal yang dilakukan oleh Komisaris Independen dan Komite Pemantau Risiko yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Saran. Kepada pihak regulator diharapkan membuat regulasi berkaitan dengan kenggotaan Komisaris Independen di BPD secara lebih spesifik dengan tujuan agar

obyektifitas pemilihan Komisaris Independen lebih optimal. Keberadaan Komite Pemantau Risiko lebih dioptimalkan kembali dengan berlatar belakang keahlian di bidang manajemen risiko, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadi risiko yang dapat menurunkan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. *Auditing: A journal of practice & theory*, 22(2), 17-32.
- Aebi, V., Sabato, G., & Schmid, M. (2012). Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis. *Journal of Banking & Finance*, 36(12), 3213-3226.
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and middle eastern finance and management*.
- Al-Matari, Y. A., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. (2012). Corporate governance and performance of Saudi Arabia listed companies. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 9(1), 1-30.
- Birindelli, G., Dell'Atti, S., Iannuzzi, A. P., & Savioli, M. (2018). Composition and activity of the board of directors: Impact on ESG performance in the banking system. *Sustainability*, 10(12), 4699.
- Booth, J. R., Cornett, M. M., & Tehranian, H. (2002). Boards of directors, ownership, and regulation. *Journal of Banking & Finance*, 26(10), 1973-1996.
- Brick, I. E., & Chidambaran, N. K. (2010). Board meetings, committee structure, and firm value. *Journal of corporate finance*, 16(4), 533-553.
- Chijoke-Mgbame, A. M., Boateng, A., & Mgbame, C. O. (2020, July). Board gender diversity, audit committee and financial performance: evidence from Nigeria. In *Accounting Forum* (Vol. 44, No. 3, pp. 262-286). Routledge.
- Dobija, D., & Kravchenko, G. (2017). Supervisory board composition and firm financial performance: a case of companies listed on the Warsaw stock exchange. *Journal of Management and Business Administration. Central Europe*, 25(4), 75-95.
- DeFond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit research after sarbanes-oxley. *Auditing: A journal of practice & theory*, 24(s-1), 5-30.
- Dewatripont, M., & Tirole, J. (1993). *Efficient governance structure: Implications for banking regulation* (Vol. 1235). Cambridge University Press, Cambridge.
- Darmadi. 2013. Board Members Education and Firm Performance: Evidence From a Developing Economy. *International Journal of Commerce and Management* 23 (2): 113-135.
- Erkens, D. H., Hung, M., & Matos, P. (2012). Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide. *Journal of corporate finance*, 18(2), 389-411.
- Fernandez, Alonso, dan Rodriguez. 2013. Board Characteristics and Firm Performance in Spain. *Corporate Governance* 14 (4): 485-503.
- Guo, Langston, dan Hadley. 2014. Business Cycle, Corporate Governance, and Bank Performance. *Research in Business and Economics Journal* Vol 9 pp: 1-16.

- Ghozali, I. (2001). Aplikasi Analisis dengan program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hermalin, B.E., dan M. S. Weisbach. 2003. Boards of Directors as An Endogenously Determined Institution: A survey of The Economic Literature. *Economic Policy Review* 9(1): 7–26.
- Indonesia, R. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (1962). Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Indonesia, G. B. (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. *PBI No. 8/4/PBI/2006, about: Good Corporate Governance Implementation*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Klein, A. (1998). Firm performance and board committee structure. *The Journal of Law and Economics*, 41(1), 275-304.
- Kusumawati, D. N., & Bambang Riyanto, L. S. (2005). Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
- Love, I., & Klapper, L. F. (2002). *Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets*. The World Bank.
- Mbilla, S. A. E., Nyeadu, J. D., Gbegble, M. K., & Ayimpoya, R. N. (2020). Assessing the Impact of Monitoring, Information and Communication on Banks Performance in Ghana. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 58-71.
- Malik, M. S., & Nadeem, M. (2014). Impact of corporate social responsibility on the financial performance of banks in Pakistan. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 10(1), 9-19.
- Mehran, H., Morrison, A. D., & Shapiro, J. D. (2011). Corporate governance and banks: What have we learned from the financial crisis?. *FRB of New York Staff Report*, (502).
- Naceur, S. B., & Omran, M. (2011). The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks' performance. *Emerging markets review*, 12(1), 1-20.
- Ozkan, S., Balsari, C. K., & Varan, S. (2014). Effect of banking regulation on performance: evidence from Turkey. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(4), 196-211.
- Prabowo, M. A., Trinugroho, I., Arifin, T., & Sutaryo, S. (2011). Governance Mechanisms and Earnings Management: Evidence from Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 14(2).
- Romano, G., Ferretti, P., & Rigolini, A. (2012, September). Corporate governance and performance in Italian banking groups. In *Paper to be presented at the International conference* (pp. 1-35).
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tahun 2013, Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

- Tornyeva, K., & Wereko, T. (2012). Corporate governance and firm performance: Evidence from the insurance sector of Ghana. *European Journal of Business and Management*, 4(13).
- Taswan, C. (2006). Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi, Edisi Kedua. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Ujunwa, A. (2012). Board characteristics and the financial performance of Nigerian quoted firms. *Corporate Governance: The international journal of business in society*.
- Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. A. (2007). Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(6), 1-26.
- Yatim, P. (2010). Board structures and the establishment of a risk management committee by Malaysian listed firms. *Journal of Management & Governance*, 14(1), 17-36.
- Veronica, S., & Bachtiar, Y. S. (2004). Good Corporate Governance Information Asymetry and Earnings Management. *Simposium Nasional Akuntansi*, 7, 60-72.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of financial economics*, 53(1), 113-142.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20190320/90/902075/bank-bjb-sering-terjerat-kredit-fiktif-ini-kata-ojk>
- <https://news.detik.com/berita/d-4340300/kasus-pembobolan-bank-bpd-ntb-2-penerima-kredit-jadi-tersangka>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kinerja-bank-besar-masih-di-bawah-ekspektasi>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20190320/90/902075/bank-bjb-sering-terjerat-kredit-fiktif-ini-kata-ojk>
- <https://news.detik.com/berita/d-4340300/kasus-pembobolan-bank-bpd-ntb-2-penerima-kredit-jadi-tersangka>